**BAB IV**

**PERANAN ALI SASTROAMDIJOJO PADA MASA ORDE LAMA PADA TAHUN 1953-1957**

1. **Kabinet Ali Sastroamidjojo I**

Pada tanggal 1 Agustus 1953 Kabinet Wilopo yang sejak tanggal 3 April 1952 memerintah negara Indonesia. Mengundurkan diri dan menjadi demisioner, karena belum bisa dibentuk kabinet baru. Kedemisioneran Kabinet Wilopo berlangsung sampai 58 hari lamanya. Itu yang paling lama dalam sejarah kekosongan pemerintahan Republik Indonesia. Hal itu disebabkan karena pada tahun 1953 banyaknya perselisihan dalam partai politik yang sangat sulit dikompromikan. Semua partai politik ingin menempati atau membentuk kabinet, sehingga dapat meduduki kursi Perdana Mentri. Partai itu pula dapat menentukan program kerjanya yang dijadikan sebagai landasan penyelesaian masalah yang ada.[[1]](#footnote-1)

Dari semua permasalahan yang ada, akhirnya Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo atau yang biasa dikenal dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1, hal ini dikarenakan Kabinet Ali Sastroamidjojo sempat menempati kursi pemerintahan sebanyak 2 kali menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Pada masa jabatannya, Kabinet Ali Sastroamidjojo banyak begerak dalam beberapa bidang

51

Perhatian Ali Sastroamidjojo terhadap politik sudah muncul sejak Ali Sastroamidjojo Masih menjadi mahasiswa. Hal ini dibuktikan karena sejak saat itu Ali Sastroamidjojo mulai memikirkan partai politik manakah yang akan ia ikuti agar bisa berjuang dalam pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia. Sehingga pada akhirnya Ali Sastroamidjojo memilih untuk masuk dalam PNI yang menurutnya PNI adalah partai politik yang paling cocok dengan azaz dan tujuan pehimpunan. PNI adalah partai yang belum lama didirikan diBandung pada saat itu tepatnya pada tahun 1928, yang didirikan oleh Bung Karno dan beberapa pendiri yang merupakan bekas anggota Pelajar Indonesia (PI), seperti Mr. Ishaq, Mr. Sartono, dan Mr. Sunario. Oleh karena itu, menurut Ali Sastroamidjojo tidak mengherankan bahwa azaz dan tujuan PNI tidak begitu jauh dengan azaz dan tujuan PI yang diikrarkan pada tahun 1923 dan 1925.[[2]](#footnote-2)

1. **Permasalahan Internal**

Banyak kegiatan yang dilakukan Ali Sartoamidjojo dalam bidang politik, perhatiannya terhadap politik sampai mengantarnya menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang dikenal dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo. Sudah dibahas sebelumnya bahwa Kabinet Ali Sastroamidjojo berdiri setelah Indonesia mengalami masalah krisis pemerintahan dikarenakan Kabinet Wilopo dibubarkan dan pemerintahan di Indonesia mengalami kekosongan selama 58 hari, akhirnya kabinet baru terbentuk dengan Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai Perdana Menterinya. Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah kabinet terakhir setelah pemilihan umum I. Kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953.[[3]](#footnote-3)

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk, pemerintahan Republik Indonesia langsung dihadapkan dengan masalah dalam negeri, yaitu adanya suatu pemberontakan DI/TII. Yang melatar belakangi pemberontakan tersebut adalah di mana kaum muslim militan Aceh telah cukup melihat politikus Jakartayang hidup menyenangkan, tidak religius, dan tidak cakap pada tahun 1949, Aceh telah dijadikan suatu provinsi republik yang otonom, tetapi pada tahun 1950 Provinsi Aceh digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Anggota Persatuan Ulama Aceh (PUSA) meliputi guru ulama modernis maupun kaum muslim awam yang taat (zuama). Mereasa kecewa akan hilangnya otonomi Aceh. Gabungan kekecewaan ini pun membentuk dasar yang potensial bagi perlawanan terhadap Jakarta.[[4]](#footnote-4)

Pada tanggal 19 September1953, Daud Beureueh dan para pengikunya dalam PUSA secara terang terangan memberontak terhadap Jakarta dengan dukungan banyak orang Aceh yang menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Daud Beureueh mengumumkan bahwa di Aceh, merupakan bagian dari Darul Islam, tidak ada lagi pemerintahan Pancasila. Pemerintahan Ali Sastroamidjojo mengirimkan pasukan-pasukan untuk menghalau kaum dari kota-kota yang penting. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendukung kebijakan kabinet dan mengutuk pemberontakan Aceh karena dianggap seperti halnya kolonial, militeristis, feodal, dan fasis.[[5]](#footnote-5)

Setelah operasi pemberantasan pemberontak Aceh akhirnya pemerintah Republik Indonesia berhasil menumpas gerakan DI/TII di Aceh, tetapi Daud Beureueh berhasil melarikan diri. Selama Kabinet Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Mentri. pemberontakan Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh tidak terjadi lagi sampai tahun 1959.[[6]](#footnote-6)

1. **Konferensi Asia-Afrika**

Pada awal tahun 1954, Perdana Mentri Sri Lanka (Ceylon) dan Jendral Sri Lanka (Sir John Kotelawala), mengundang para perdana menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammad Ali) dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pemimpin pemerintah negara tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden Soekarno menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia-Afrika pada pertemuan Konferensi Colombo.[[7]](#footnote-7)

Gagasan untuk mempersatukan bangsa-bangsa di Asia-Afrika sebenarnya tidaklah baru muncul ketika Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung diadakan. Jauh sebelum pelaksanaanKonferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, Soekarno pada tahun 1927-an dalam sebuah pidatonya di Bandung antara lain mengataan, “Kalau Barong Liong Sai dari Tiongkok bekerja sama dengan Lembau Nandi dari India, dengan Sphinx dari Mesir, dengan Gajah Putih dari Muangthai, dan dengan Banteng dari Indonesia, itulah yang sebetulnya yang membuat Asia-Afrika.”[[8]](#footnote-8)

Pidato itu ternyata telah mendorong dan menjadi sumber inspirasi bagi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, pada tanggal 18-24 April 1955. Persiapan penyelenggaraannya di bahas oleh Perdana Menteri dari India, Pakistan, Ceylon, Birma, dan Indonesia di Colombo, Ceylon atau Sri Langka, 28 April-2 Mei 1954. Yang disebut “Kekuatan Colombo”. Disana Ali Sastroamidjojo mengusulkan suatu konferensi besar negara-negara Afrika-Asia, yang lain segera mendukung gagasan tersebu. Suatu konferensi pun dijadwalkan akan diadakan pada bulan April 1955.[[9]](#footnote-9)

Pemerintah Indonesia, melalui saluran diplomatik, melakukan pendekatan kepada 18 negara Asia dan Afrika untuk mengetahui sejauh mana perundingan negara-negara di luar Indonesia terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika. Pada umumnya mereka mengapresiasi dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tersebut.[[10]](#footnote-10)

Pada tanggal 18 Agustus 1954, melalui suratnya, Perdana Menteri Jawaharlah Nehru dari India mengingatkan Perdana Menteri Indonesia tetang perkembangan situasi dunia saat itu yang semakin gawat, sehubungan dengan adanya usul untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika. Dikarenakan Perdana Menteri India menerima usulan itu disertai dengan keraguan akan berhasil dan tidaknya usulan konferensi tersebut. Barulah setelah kunjungan perdana menteri Indonesia berkunjung ke India sampai pada tanggal 25 September 1954, dia yakin akan pentingnya konferensi tersebut. Keyakinan serupa dinyatakan pula oleh Perdana Menteri Birma U Nu pada 28 September 1954.

Pada 28-29 Desember 1954 atas undangan perdana menteri Indonesia para perdana Menteri peserta konferensi Colombo (Birma, Ceylon, India, Indonesia dan Pakistan) mengadakan pertemuan di Bogor untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia-Afrika. Kelima negara peserta konferensi Bogor menjadi sponsor Konferensi Asia-Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut, yang ditetapkan akan berlangsung pada minggu akhir bulan April 1955.[[11]](#footnote-11)

Persiapan-persiapan konferensi pun segera dipersiapkan dan dibentuklah kepanitiaan. Dalam kepanitiaan tersebut dibentuk tiga komite yaitu: Ketua konferensi : Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri Indonesia) yang merangkap sebagai Ketua Komite Politik, Ketua Komite Ekonomi : Roosseno (Menteri Perekonomia Indonesia), Ketua Komite Kebudayaan : Muhammad Yamin, (Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia), Sekretaris Jendral Konferensi : Roeslan Abdulgani, (sekretaris Jendral Kementrian Luar Negeri Indonesia).[[12]](#footnote-12)

Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia-Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintah dari 25 Negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanyasatu negara yang menolak undangan tersebut, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena memang negra itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya, sedangkan 24 negara lainnya menerima dengan baik undangan tersebut.[[13]](#footnote-13)

Para delegasi dari masing masing negara berdatangan, para peserta menginap di Hotel Homann dan Hotel Pereanger. Acara Konferensi Asia-Afrika di mulai pada Senin, 18 April 1955. Sejak pagi telah tampak kesibukan di Kota Bandung untuk menyambut pembukaan Konferensi Asia Afrika.[[14]](#footnote-14)

Para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homann dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak diantara mereka yang memakai pakaian nasional masing-masing yang beraneka corak dan warna. Perjalanan para delegasi tersebut ini kemudian dikenal dengan nama “Langkah Bersejarah” (The Bandung Walks).[[15]](#footnote-15)

Konferensi Asia Afrika berlangsung selama 7 hari yang mulai dari tanggal 18 April – 24 April 1955 yang menghasilkan kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

* 1. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
  2. Mengakui persamaan ras juga semua bangsa besar maupun kecil
  3. Tidak melakukan itervensi terhadap negara lain
  4. Tidak melakukan agresi ataupun kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatau negara
  5. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu dari negara besar.[[16]](#footnote-16)

Deklarasi yang tecantum pada komunike tersebut, selanjutnya dikenal dengan Dasa Sila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

1. **Kabinet Ali Sastroamidjojo II**
2. **Bidang Sosial**

Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan, karena masyarakat adalah zoon politicon atau masyarakat sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup. Yang perlu diperhatikan adalah, bahwa interaksi sosial yang negatif akan menjerumuskan pada hal-hal yang negatif pula, sebaliknya apabila dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial yang positif maka akan melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang positif pula untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam kehidupan.

Keadaan sosial akan mempengaruhi keadaan yang lainnya, oleh karena itu pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II pergerakan bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat Indonesia pemerintah melakukan perbaikan melalui beberapa cara, yaitu penyuluhan sosial, bimbingan sosial, asistensi sosial dan juga perbaikan sosial.[[17]](#footnote-17)

Dalam rangka penyuluhan sosial, langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui penyuluhan lisan, penyuluhan tertulis dan penyuluhan bergambar. Cara tersebut dimaksudkan sebagai alat penerangan untuk masyarakat dan dapat menanam sikap kesatuan kemudian menumbuhkan sosial kenegaran yang akhirnya akan menciptakan cinta tanah air. Penyuluhan sosial yang dilakukan dengan penyuluhan lisan ialah melaksanakan penyuluhan kepada umum, yang dimaksudkan akan pemahaman akan sosial dapat dikuasai oleh seluruh anggota masyarakat dari semua lapisan secara cepat dan merata. Penyuluhan sosial kepada golongan-golongan tertentu atau khusus, yakni penyuluhan kepada golongan-golongan wanita, pemuda dan pemudi, siswa serta golongan yang lainnya. Menyelenggarakan gerak-gerak pekan sosial, yang mempunyai dua tujuan, pertama ditunjukan kearah semua masyarakat guna melaksanakan terwujudnya kesejahteraan sosial , kedua bertujuan agar dapat menimbulkan jiwa sosial yang kongkrit. Dan penyuluhan sosial pidato melalui radio, hal ini bertujuan agar gerak penyuluhan sosial dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat diseluruh pelosok tanah air.[[18]](#footnote-18)

Sedangkan penyuluhan sosial secara tertulis pemerintah menyelenggarakan penerbitan majalah-majalah sosial yang menjabarkan tentang tujuan pelaksanaan pekerjaan sosial untuk menimbulkan auto-activiteit masyarakat dalam masalah kesosialan, memberikan petunjuk-petunjuk mengenai usaha-usaha kemasyarakatan serta memajukan perkembangan pekerjaan kemasyarakatan. Selain itu penyuluhan bergambar dilakukan dengan cara menyelenggarakan exposisi-exposisi sosial berupa lukisan, neraca dan hasil-hasil usaha pekerjaan sosial serta pemutaran-pemutaran film kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur sosial.[[19]](#footnote-19)

Selain itu bimbingan sosial juga dilakukan agar membangkitan sumber-sumber kekuatan dalam masyarakat dengan menggerakan auto-activiteit rakyat dalam lapangan sosial. Untuk melakukan bimbingan sosial ini pemerintah memberikan berbagai pendidikan untuk dapat mengisi, memupuk dan memelihara perkembangan masyarakat secara teratur menuju kearah kesejateraan sosial.[[20]](#footnote-20) Usaha selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial adalah melakukan asistensi sosial, bertujuan untuk menunaikan kewajiban menjaga anak-anak dari bahaya-bahaya kegagalan dalam hidupnya, yang disebabkan perkembangan pribadinya terhalang.[[21]](#footnote-21)

1. **Bidang Ekonomi**

Pada umumnya, program pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II dalam bidang ekonomi adalah, pertama, memulai pembangunan secara teratur terencana dan berjangka waktu tertentu yaitu lima tahun lamanya, yang ditetapkan dengan undang-untung dengan menitik-beratkan pada dasar kepentingan rakyat. Kedua, berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat dengan mengutamakan pada sektor kebutuhan yang primer. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam struktur ekonomi nasional semua kegiatan ditunjukan untuk mengabdikan segala sesuatu pada masyarakat dan memperhatikan kepentingan rakyat, dengan kata lain untuk meninggikan kemakmuran rakyat, memperbesar pendapatan nasional dan membantu pembagian pendapatan nasional secara lebih adil. Ketiga, mempergiat perkembangan kooperasi.[[22]](#footnote-22)

Selain program kerja dalam bidang ekonomi yang disebutkan sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II juga bergerak dalam perindustrian, yaitu memajukan pendirian industry nasional yang bertujuan agar secepat mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhan sendiri dan dapat melindungi industry nasional dari persaingan asing.[[23]](#footnote-23) Selainitu, pembangunan industry dikarenakan struktur ekonomi Indonesia masih berdasarkan agrarian. Oleh karena itu perekonomian Indonesia harus dimajukan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk Indonesia memproduksi sendiri, memajukan industry ini sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekonomi.[[24]](#footnote-24)

Untuk memenuhi program kerja tentang perkembangan industri, pemerintah mendirikan beberapa perusahan besar, diantaranya membuka pabrik soda dan chlor di Waru pada Juli 1956, membuka pabrik semen di Gresik pada mei 1957, membuka pabrik pemintalan di Cilacap, membuka pabrik pemintalan di Semarang, dan juga membuka pabrik pemintalan di Pematang Siantar Medan. Dengan adanya industri-industri besar tersebut, mengharapkan kebutuhan primer bangsa Indonesia tidak lagi tergantung dari luar negeri. Dalam hal ini pakaian adalah yang terpenting, sehingga pembangunan industri tekstil mendapat perhatian yang khusus, baik dalam hal pemintalan maupun pertenunan, finishing atau tricotage.[[25]](#footnote-25)

Dalam usaha pembangunan ekonomi serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar negeri dalam hal kebutuhan barang-barang pokok, pembangunan pabrik rabuk, sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai tempat yang utama dalam rangkaian kerja pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terus berusaha kearah pembangunan dan berusaha membantu kegiatan-kegiatan masyarakat yang berusaha memajukan ekonomi. Diantara rencana pemerintah yang telah mempunyai bentuk nyata adalah penyempurnaan dan melengkapi pabrik fosfat dengan produksi kurang lebih sebesar 5.000 ton setahun dengan target produksi 30.000 tahun tiap tahunnya, pembangunan pabrik urea di Sumatera Selatan dengan target produksi 100.000 ton tiap tahun.[[26]](#footnote-26)

Untuk melindungi industri dalam negeri terhadap persaingan barang impor, pemerintah Republik Indonesia mengadakan pemungutan Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) yang lebih tinggi untuk barang-barang. Hal ini lembih tinggi jika dibandingkan dengan Tambahan Pembayarn Impor (T.P.I) untuk bahan-bahannya, atau hanya diimpor jika completely knocked down. Untuk mengurangai kesukaran perusahan-perusahaan industri dan pembayaran uang muka, pemerintah Indonesia melakukan penundaan pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) sampai adanya dokumenten.[[27]](#footnote-27)

Selain dalam bidang Perindustrian, pertambangan juga menjadi sektor tersendiri, yang juga memberikan peran dalam menambah produksi dalam negeri. Dalam urusan pertambangan produksi yang terpenting adalah minyak, yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing, seperti NV, BPM, SVPM CPPM, dan juga perusahaan campuran antara pemerintah dan BPM seperti, NV, NIAM.[[28]](#footnote-28)

Koperasi juga menjadi salah satu program pemerintah, sesuai dengan dalam UUD sementara pasal 38 ayat 1, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Maka dari itu, kementrian ekonomi berusaha memupuk dan mengembangkan ke koperasi agar terbentuk sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Kooperasi harus tumbuh dari bawah, dari petani kelapa. Dari koperasi-koperasi kopra yang telah ada yaitu pada 12 Juli 1956 adalah sebayak 209 buah, jumlah tersebut meningkat pada 10 Desember 1956 menjadi 327 buah. Dari jumlah 327 buah ini ada 3 buah yang berbadan hukum, 46 buah dalam tingkat pengamatan dan lainnya masih dalam tingkat penilikan.[[29]](#footnote-29)

Selain itu, persedian, peredaran dan pembagian barang-barang juga dilakukan untuk meningkatan perekonomian Indonesia. Perekonomian dalam Negeri dan perekonomian umum diadakan dengan tujuan pertama: agar perlengkapan barang yang dibutuhkan untuk penghidupan rakyat dan pembangunan, baik yang impor dari luar Negeri maupun yang dihasilkan didalam Negeri dapat dipenuhi diseluruh Indonesia, kedua mengusahakan agar bangsa Indonesia mendapat kedudukan yang penting dalam segala macam usaha dilapangan produksi, pengangkutan, perdagangan, perkreditan dan sebagainya. Hal ini adalah salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan perekonomian nasional. Selain itu juga bertujuan untuk dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi dapat memberi bantuan kepada yang lemah ekonominya. Melalui bimbingan dan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan[[30]](#footnote-30)

1. **Bidang Politik**

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II perkembangan dalam bidang politik adalah hal yang tidak asing lagi, dimana sebuah negara membutuhkan politik untuk memajukan dan mensejahterakan negara dan juga untuk menjaga kedaulatan negara dan hubungan antara negara. Seperti halnya dalam pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) pembebasan Irian barat dan memperbaiki susunan Kepemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Indonesia senantiasa diusahakan untuk mendapatkan persetujuan dari kerajaan Nederland guna mewujudkan hubungan baru yang lazim antara negara-negara yang berdaulat. Tapi ternyata, bahwa usaha tersebut senantiasa kandas karena ketidak sediaan Pemerintah kerajaan Nederland.[[31]](#footnote-31)

Masalah pembatalan hubungan Indonesia-Nederland dapat dikatakan sebagai suatu masalah besar yang sangat meresahkan dikalangan masyarakat Indonesia. Sebab, masalah tersebut mulai dipecahkan pada masa peralihan yaitu masa akan berakhirnya kekuasaan Burhanuddin Harahap ke masa terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan masa akan berakhirnya dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS) ke masa dewan perwakilan rakyat (DPR) hasil pilihan rakyat sendiri.[[32]](#footnote-32)

Surat pemberitahuan 13 Februari 1956 dari Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri (Burhanuddin Harahap) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara tentang Keputusan Kabinet tanggal 13 Februari 1956 untuk membubuarkan UNI Indonesia Belanda secara unilateral dan akhirnya diterimanya suatu usul undang-undang tentang pembantalan secara unilateral hubungan Indonesia-Nederland beserta Statut-Uni dan perjanjian-perjanjian yang dilampirkan oleh dewan perwakilan rakyat sementara pada tanggal 28 Februari 1956, menimbulkan konstelasi politik dikalangan masyarakat, terutama dikalangan partai di Indonesia.[[33]](#footnote-33)

Secara langsug maupun tidak langsung, masalah pembatalan Uni-Statut[[34]](#footnote-34) menyebabkan pengunduran diri dari beberapa anggota parlemen sementara dari fraksi-fraksi oposisi dan juga dari Ketua serta Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Kondisi ini diperparah dengan tidak disahkannya rencana Undang-Undang tentang pembatalan Uni-Statut yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Tetapi ini tidak berarti bahwa wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara tidak menyetujui adanya pembatalan Uni-Statut. Bahkan mereka menghendaki agar pembatalan tersebut jangan hanya diletakan kepada Uni-Statut tetapi juga pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan faktor-faktor pilitik-yuridis baik bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Secara umum pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) mempunyai dua aspek. Pertama, aspek dalam negeri yaitu tentang aspek-aspek nasional dari pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pemulihan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. pada awalnya dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) perusahan-perusahaan Belanda atau posisi Belanda pada umumnya di Indonesia mempunyai posisi istimewa maka dengan dihapuskannya Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) posisi Belanda yang istimewa dihapuskan. Pada umumnya pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) bertujuan agar kedaulatan Indonesia penuh dengan tidak diganggu oleh isi perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Kedua, aspek luar negeri: aspek-aspek internasional lebih penting, karena negara-negara lain memandang Indonesia karena adanya ikatan Indonesia dengan Belanda tersebut. Tetapi sekarang dengan hilangnya Uni Indonesia Belanda itu sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, tidak terikat lagi dengan Kerajaan Nederland.[[35]](#footnote-35)

Selain pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB), Kabinet Ali Sastroamidjojo II juga menyusun perencanaan pembebasan Irian Barat, tepatnya pada tanggal 16 Agustus telah disahkan undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. Hal ini telah diumumkan pula oleh Presiden Soekarno pada hari ulang tahun Ke-XI Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1956. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II tentang Irian Barat adalah berbunyi : a. Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme didunia internasional. b. Membentuk program Irian Barat.[[36]](#footnote-36)

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, pembatalan perjanjian-perjanjian KMB mempunyai arti yang sangat penting, karena pembentukan perjanjian-perjanjian KMB adalah benih pertama pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat. Hal ini dapat dilihat dari isi undang-undang pembatalan daerah Otonom Irian Barat. Inti dari isi undang-undang ini adalah, bahwa setelah ditetapkan undang-undang pembatalan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), maka tidak ada rintangan lagi untuk membentuk Irian Barat menjadi provinsi otonom, sesuai dengan isi Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.[[37]](#footnote-37)

Pada tanggal 10 Agustus 1955, lima belas negara-negara Asia Afrika, dengan berpedoman azas-azas yang disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung tahun 1955, mengajukan permohan agar persoalan tentang Irian Barat dimasukan dalam agenda rapat ke-10 sidang umum. Pada sidang Konferensi Asia-Afrika diusulkan agar perundingan-perundingan tersebut dimulai oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda melakukan perundingan-perundingan mengenai banyak hal yang penting, seperti yang diterangkan dalam keterangan bersama Indonesia-Belanda pada 7 Desember 1955, yaitu salah satunya tentang harapan tercapainya penyelesaian persoalan Irian Barat.[[38]](#footnote-38)

Pada tanggal 23 Oktober 1956 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan sebuah resolusi yang berhubungan dengan persoalan Irian Barat, yang berisi, mengingat bahwa daerah Irian Barat adalah bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Bahwa sebagai akibat dari perundingan KMB daerah Irian Barat menjadi daerah sangketa antara negara-negara Indonesia dan Belanda yang statusnya akan ditentukan dalam waktu satu tahun dengan jalan perundingan. Bahwa semenjak tahun 1950 oleh pihak Indonesia telah diusahakan beberapa kali perundingan dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, namun sebagai akibat dari sikap Belanda perundingan tersebut selalu gagal. Bahwa karena kegagalan tersebut, Indonesia sebagai anggota PBB memandang perlu untuk mengemukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB ke-IX tahun 1954.[[39]](#footnote-39)

1. Ali Sastroamdijojo, *Tonggak-Tonggak Perjuanganku*...,p.325. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali Sastroamdijojo, *Tonggak-Tonggak Perjuanganku*...,p.73. [↑](#footnote-ref-2)
3. Marwati Djoened Poespoenegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia IV.*..,p.219. [↑](#footnote-ref-3)
4. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Moderen 1200-2008*...,p.514. [↑](#footnote-ref-4)
5. M.C. Ricklefs, *sejarah Indonesia Moderen 1200-2008*...,p.515. [↑](#footnote-ref-5)
6. M.C. Ricklefs, *sejarah Indonesia Moderen 1200-2008*...,p.515. [↑](#footnote-ref-6)
7. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*, (Bandung: Museum KAA,1992),P.10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Taufik Adi Susilo *Soekarno Biografi singkat 1901-1970,* (Yogyakarta: Garasi,2016),P.127. [↑](#footnote-ref-8)
9. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*...,p.515. [↑](#footnote-ref-9)
10. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*...,p.12. [↑](#footnote-ref-10)
11. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*...,p.12-13. [↑](#footnote-ref-11)
12. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*...,p.18. [↑](#footnote-ref-12)
13. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*...,p.14. [↑](#footnote-ref-13)
14. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*...,p.15. [↑](#footnote-ref-14)
15. Deppen,*Panduan Konferesni Asia-afrika*...,p.16. [↑](#footnote-ref-15)
16. Taufik Adi Susilo *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970...,p.129-130.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.322. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.323. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.324. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.324. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.326. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan* (Jakarta: Kementrian penerangan RI, tahun 1956), p.67-68. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.67. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.72. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.73. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan* ...,p.74. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.75. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.80. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.82-83. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.84. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.17. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.17. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.18. [↑](#footnote-ref-33)
34. Uni-Statut adalah gabungnya Indonesia dengan Negara Belanda sebagai negara federasi dan menjadi hubungan berdasarkan perjanjian Internasional. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.19. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.24. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.25. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.34. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Kabinet Ali-Roem-Idham Program dan pelaksanaan*...,p.36. [↑](#footnote-ref-39)